

## POLITIK IDENTITAS DAN PERAN MEDIA DALAM MENCIPTAKAN POLARISASI di ACEH: STUDI KASUS PEMBERITAAN PEMILUKADA GUBERNUR

Ramatillah<sup>1</sup>

<sup>1</sup>IAIN Lhokseumawe

Email: [rahmatilahlangsa@gmail.com](mailto:rahmatilahlangsa@gmail.com)

**Abstrak:** Dalam upaya memenangkan kontestasi pemilu, elite politik memanfaatkan isu politik identitas baik secara langsung maupun melalui media *online*, dengan tujuan untuk mengerahkan dukungan calon pendukung ke calon tertentu sehingga dukungan yang didapat bukan karena visi dan misi para bakal calon, tetapi karena perbedaan identitas. Jurnal ini mengeksplorasi bagaimana isu – isu keagamaan, etnis, ideologi nasional dan konflik historis di Aceh yang kembali hadir mewarnai media massa dan media sosial saat ini, menjadi polemik yang perlu dikaji lebih dalam untuk mendeskripsikan keadaan Aceh pada masa pilukada tahun 2024. Oleh karena itu, penulis melakukan analisis mendalam sehingga menghasilkan deskripsi yang jelas terkait politik identitas keagamaan, suku, ras, dan konflik yang diangkat oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Pilkada yang akan diselenggarakan 27 November 2024 mendatang juga diwarnai oleh politik identitas. Berdasarkan hasil pengamatan, observasi dan wawancara dengan masyarakat dan anggota partai politik yang terlibat, pasangan calon menggunakan politik identitas untuk menarik simpati masyarakat Aceh dan membuat masyarakat percaya bahwa calon pemimpin Aceh adalah tokoh yang dapat dipercaya dan akan membangun Aceh menjadi lebih baik.

**Kata Kunci:** Media, Politik Identitas, Pilkada, Aceh

*Abstract: In an effort to win the election contest, political elites utilize the issue of identity politics both directly and through online media, with the aim of mobilizing the support of potential supporters for certain candidates so that the support they get is not because of the vision and mission of the prospective candidates, but because of differences in identity. This journal explores how religious, ethnic, national ideology and historical conflict issues in Aceh are returning to color mass media and social media today, becoming a polemic that needs to be studied more deeply to describe the situation of Aceh during the 2024 post-conflict regional elections. , the author carried out an in-depth analysis to produce a clear description of the politics of religious, ethnic, racial and conflict identities raised by the pair of candidates for governor and deputy governor in Aceh Province. The results of the research show that the regional elections which will be held on November 27 2024 will also be colored by identity politics. Based on the results of observations, observations and interviews with the community and members of the political parties*

*involved, the candidate pairs used identity politics to attract the sympathy of the Acehnese people and make the people believe that the prospective leader of Aceh was a trustworthy figure and would build Aceh for the better.*

**Keywords:** *Media, Identity Politics, Pilkada, Aceh*

## PENDAHULUAN

Indonesia telah menyelenggarakan pesta demokrasi secara berkala, salah satunya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang telah dilaksanakan pada tahun 2005, 2010 dan 2015. Selain itu, pemilihan legislatif (Pileg) mulai dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota telah digelar sejak tahun 2005 lalu. Kemudian pada tahun 2019, Indonesia telah menggelar pemilihan presiden (pilpres) dan Pileg secara perdana dan serentak. Setelah mengalami dinamika pasca reformasi, kenyataan demokrasi di Indonesia mengalami transformasi dan peralihan yang signifikan. Pada ajang perpolitikan, kampanye menjadi sebuah aktivitas berkala yang dilakukan oleh para kontestan pemilu. Kampanye merupakan suatu upaya untuk mempengaruhi target untuk menerima suatu gagasan atau ide tertentu. Hal ini kemudian membuat posisi kampanye menjadi vital pada ajang perpolitikan.

Permasalahan yang tidak esensi meliputi suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), konten berita palsu dan ujaran kebencian, politik identitas, selalu muncul di media dan dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye. Hal itu diperparah dengan adanya mobilitas kampanye di media sosial yang melibatkan banyak orang. Melalui pergerakan pemengaruh (*influencer*) dan pendengung (*buzzer*), penyebaran suatu isu menjadi cepat tapi tidak akurat karena warganet mudah menyukai (*like*) dan membagikan (*share*) unggahan yang ada di media sosial. Salah satu isu tidak esensi yang pada pemilu 2019 adalah isu yang pernah terjadi pada Pilkada DKI 2017, yakni politik identitas, seperti etnis dan agama. Isu yang kerap timbul pada proses kontestasi politik skala nasional dan lokal adalah kecenderungan perilaku dan pilihan politik yang dilatarbelakangi oleh identitas etnis. Ruang publik kemudian dipenuhi oleh perbincangan perilaku. Hal tersebut merupakan bagian dari keragaman masyarakat Indonesia yang terdiri dari aneka ragam agama, budaya, adat, dan etnis dalam konteks integrasi nasional sehingga konsepsi ini

menjadi model bagaimana identitas menjadi simbol kemajemukan dengan tetap memprioritaskan nilai persatuan dan kesatuan.<sup>1</sup>

Dalam upaya memenangkan ajang pemilu, *elite* politik memanfaatkan isu politik identitas baik secara langsung maupun media *online*, dengan tujuan untuk mengerahkan dukungan calon pendukung ke calon tertentu sehingga dukungan yang didapat bukan karena visi dan misi para bakal calon, tetapi karena perbedaan identitas. Perkembangan di beberapa negara di Asia, Afrika, Eropa Timur, dan negara – negara pecahan Uni Soviet mengalami kegagalan demokrasi mayoritas disebabkan oleh perselisihan etnis.<sup>2</sup>

Indonesia telah melaksanakan pesta demokrasi secara serentak pada 14 Februari tahun 2024. Pesta demokrasi dilakukan dengan cara pemilihan langsung para calon pemimpin. Pemilu pada Februari 2024 lalu diselenggarakan untuk memilih DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Selanjutnya, pada 27 November yang akan datang, rakyat Indonesia juga akan kembali memilih secara langsung calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah pada PILKADA serentak seluruh daerah di Indonesia.

Aceh adalah salah satu provinsi yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah, yaitu memilih Calon Walikota/Bupati dan Wakil Walikota/Wakil Bupati serta Gubernur dan Wakil Gubernur. Secara historis dan letak geografis Provinsi Aceh, Pemilihan Umum Kepala Daerah nantinya akan diwarnai dengan Politik Identitas yang mengangkat unsur keagamaan dan perjuangan konflik Aceh dimasa lampau. Sebagai contoh, pada Pilkada tahun 2017 seluruh kandidat menggunakan strategi politik identitas dengan mengonstruksikan spirit nasionalisme lokal dalam membangun kepercayaan dan citra publik dari masyarakat. Identitas keacehan yang dilakukan para kandidat dilakukan dengan berbagai cara seperti ikatan – ikatan, simbol – simbol keaslian suatu daerah baik agama, ras, maupun etnis. Menurut data dari Komisi Pemilihan Umum, pasangan Irwandi – Nova memenangkan 53,5% suara di Kabupaten Aceh Tengah dari total 14 Kecamatan dan di Kecamatan Bintang, mereka memenangkan 66,3% suara dari total 5.951 suara sah dan tingkat partisipasi pemilih sebesar 87,5%. Namun, terdapat juga fenomena politik

---

<sup>1</sup> Restu Hasanuddin. 2024. Pendekatan Kolaboratif Terkait Pencegahan Politik Identitas Pada Pemilihan Kepala Daerah : Jurnal Lemhannas RI

<sup>2</sup> Mahpudin, M. (2021). Kebangkitan Politik Identitas dalam Proses Demokratisasi di Indonesia Pasca Orde Baru. Jurnal Sosial Politik, 7(2), 148–160.

identitas etnis di kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah dimana masyarakatnya mudah digiring ke dalam isu primordial. Meskipun demikian, kemenangan pasangan Irwandi – Nova pada pilkada 2017 tidak hanya didasarkan pada faktor identitas etnis, tetapi juga karena rekam jejak serta faktor ketokohan pasangan calon tersebut.<sup>3</sup>

Jika dilihat secara konkret, Sebagian masyarakat melihat praktik politik identitas adalah sesuatu yang lumrah mengingat masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk. Hanya saja, jika politik identitas mengarah kepada tindakan diskriminasi kepada kelompok tertentu, maka hal tersebut menjadi masalah yang dapat ditimbulkan oleh politik identitas. Sejumlah kasus intoleransi, kekerasan, dan menguatnya sentimen identitas agama dan etnis memunculkan praktik diskriminasi dan istimewa terhadap kelompok identitas lain yang berbeda. Kondisi ini selalu digunakan oleh elit politik yang memiliki peran vital dalam menguatkan sentimen identitas dan agama untuk memperoleh kekuasaan, khususnya menjelang tahun politik.<sup>4</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, aturan larangan atas praktik politik identitas. Pasal 69 huruf (b) menyebut kampanye dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan calon gubernur dan atau juga partai politik. Lalu, Pasal 69 huruf (c) mengatur larangan untuk melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan atau juga kelompok masyarakat.<sup>5</sup>

Adanya isu – isu keagamaan dan konflik historis di aceh yang kembali hadir mewarnai media massa dan media sosial saat ini, menjadi polemik yang perlu dikaji lebih dalam untuk mendeskripsikan keadaan Aceh pada masa pemilu tahun 2024. Oleh karena itu, penulis akan melakukan analisis mendalam sehingga menghasilkan deskripsi yang jelas terkait politik identitas keagamaan dan konflik yang diangkat oleh kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Aceh.

---

<sup>3</sup> Ian Perdana. 2023. Strategi Propaganda Dalam Pilkada Gubernur Aceh Tahun 2017: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 9547-9557

<sup>4</sup> Nur Lailatul Aidah, Sindy Rochmadian, Usna Maliha. 2023. Politik Identitas Dalam Pemilu DanPengaruhnya Terhadap Demokrasi Di Indonesia.Sosio Yustisia : Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial 3 (1)

<sup>5</sup> Aryojati Ardipandanto.2023. Upaya Mencegah Penyalahgunaan Politik Identitas Pada Pemilu 2024: PUSLIT BKD, Vol. XV, No. 6/II/Puslit/Maret/2023 [https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-XV-6-II-P3DI-Maret-2023-203.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XV-6-II-P3DI-Maret-2023-203.pdf) Diakses pada 15 Oktober 2024

## TINJAUAN PUSTAKA

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Agung Suryo Setyantoro dengan judul Strategi Pilkada Aceh Tengah 2017: Antara Kontestasi Dan Aliansi Antar Belah. Penelitian ini menjelaskan tentang politik identitas yang terjadi pada Pilkada 2017 di dataran Gayo. Masyarakat Gayo dikenal dengan masyarakat yang memelihara tradisi, dan membagi masyarakatnya menjadi dua kelompok belah (klan), yakni *Uken-Toa*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun hasil dari penelitian Agung adalah penggunaan politik Uken-Toa pada pilkada 2017 menampilkan fragmen yang berbeda bila dibandingkan dengan masa pra-reformasi. Saat ini fragmentasi antara Uken-Toa bukan lagi untuk memposisikan keduanya berlawanan tetapi membuatnya menjadi bersatu. Kita dapat melihat bagaimana dualitas kelompok Uken dan Toa sebagai mekanisme pembagian masyarakat Gayo yang awalnya mengarah pada persaingan kultural diantara keduanya, namun pada masa kini telah dikonstruksi ulang sebagai mekanisme untuk membangun aliansi bagi kepentingan kemenangan pilkada di Kabupaten Aceh Tengah. Dengan demikian, paradigma relasi Uken-Toa saat ini telah bertransformasi dari paradigma kompetisi bergeser pada paradigma aliansi, dan factor political interest menjadi faktor utama pendorong transformasi tersebut.<sup>6</sup>

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nur Ainun dkk dengan judul Politik Identitas Etnis dalam Pilkada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang menjelaskan tentang keterlibatan politik identitas etnis dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan pendekatan fungsionalis yang pendekatannya dibangun antara klan-klan dan berdasarkan garis-garis keturunan etnis yang memungkinkan adanya hubungan politik dengan kelompok maupun organisasi etnis. Hasil dari penelitian Ainun dkk menunjukkan bahwa keterlibatan dari etnis memiliki pengaruh dalam hal untuk menjadi sumber suara. Hubungan identitas etnis menjadi pertimbangan dalam menentukan pilihan pemilih. Keberadaan kelompok-kelompok etnis mampu dimanfaatkan oleh pasangan calon dengan cara menggunakan pendekatan-pendekatan sebagai tempat atau basis mendulang suara. Adanya hubungan kekerabatan

---

<sup>6</sup> Agung Suryo.2019. Pilkada Aceh Tengah 2017: Antara Kontestasi Dan Aliansi Antar Belah: Seminar Series in Humanities and Social Sciences

antar etnis yang terjadi dari pendekatan tersebut juga menjadi alasan masyarakat untuk memilih. Selain itu terdapat dukungan dari etnis seperti mensosialisasikan kembali dan mengajak keluarga untuk memilih salah satu pasangan calon. Sementara itu dari adanya identitas-identitas etnis tersebut menjadi sebuah kekuatan politik untuk mendapat dukungan suara.<sup>7</sup>

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini memiliki tujuan utama adalah menjelaskan bagaimana komunitas online mampu mempengaruhi gaya hidup berkelanjutan terutama dalam hal lingkungan. Penelitian yang dilakukan secara kualitatif memiliki karakteristik sesuai dengan tujuan penelitiannya yaitu memahami sebuah arti yang disampaikan dari setiap responden terhadap fenomena yang sedang diteliti, melalui pendekatan ini penelitian bisa dilakukan dengan pertanyaan yang lebih terbuka dan peneliti mampu memahami fenomena yang sedang diteliti, data-data yang didapatkan dari penelitian ini dapat berupa kata-kata maupun gambar sesuai dengan lokasi penelitian, semua informasi dan data yang didapatkan akan dilakukan analisis berdasarkan teks gambar maupun tema, serta penelitian ini mengidentifikasi pendapat dari setiap partisipan. Secara keseluruhan gambaran dari penelitian ini berkarakteristik seperti tersebut (Arikunto, 2019).

Penelitian ini berfokus pada metode kualitatif deskriptif dengan metode ini penelitian akan dilakukan secara sistematis maupun spesifik untuk mendapatkan informasi secara detail mengenai peranan dari komunitas online yang diwujudkan dalam bentuk media sosial untuk mendukung gaya hidup berkelanjutan pada bidang lingkungan. Metode ini dilakukan dengan melaksanakan penelitian lapangan secara spesifik maupun secara sistematis guna menyelesaikan permasalahan tertentu yang diangkat dalam topik penelitian. Beberapa penelitian menyampaikan metode ini tidak memiliki keterkaitan dengan angka-angka (Moleong, 2018). Untuk itu dari penelitian ini hasil akhirnya diharapkan mampu memiliki hasil informasi yang bermakna secara jelas maupun secara spesifik. Begitu dalam hal ini penelitian yang akan dilakukan akan didapatkan data-data

---

<sup>7</sup> Nur Ainun.2022. Politik Identitas Etnis dalam Pilkada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota: Jurnal Prosiding ISSN (2)

dari kajian terdahulu yang sudah disatukan oleh peneliti kemudian akan ditulis untuk menjadi referensi dalam analisis penelitian. Penelitian nanti didesain dengan menganalisis postingan-postingan yang disampaikan oleh komunitas di media sosial untuk mendapatkan makna-makna tertentu dari media yang ada. Menurut penjelasan menganalisis penelitian kualitatif dilakukan untuk menghasilkan sebuah komunikasi dalam wujud informasi yang lebih akurat (Sugiyono, 2022).

Penelitian ini menempatkan metode pengumpulan data berupa pemantauan maupun pengamatan pacar kelamaan media sosial instagram Zero Waste Indonesia. Peneliti melakukan pengamatan dan juga pemantauan mengenai berbagai macam postingan yang dihasilkan dari media sosial komunitas tersebut. Untuk itu langkah-langkah yang dipakai dalam analisis media adalah menetapkan informasi apa yang ingin disampaikan, melakukan analisis pada postingan postingan yang berat ditentukan, memberikan interpretasi pada postingan tersebut dan memberikan kesimpulan atas postingan yang dihasilkan dari komunitas tersebut (Ruslan, 2021). Sedangkan data-data penelitian ini merupakan postingan media sosial yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Praktik Politik Identitas di Indonesia

Menurut Lukmantoro, politik identitas adalah politik yang memprioritaskan kepentingan anggota kelompok yang mempunyai keselarasan personalitas atau karakteristik dalam hal ras, etnis, gender, atau agama.<sup>8</sup> Politik identitas adalah perbuatan politik yang bermaksud untuk memodifikasi politik dan membidikkan usaha untuk memantau nilai-nilai yang disangka penting sampai tuntutan yang paling mendasar, yaitu penetapan kodrat sendiri atas dasar primordialitas.

Dalam format keetnisan, politik identitas terinspirasi dengan adanya upaya memasukan nilai – nilai terhadap peraturan daerah, menyendirikan tempat pemerintahan, kemauan menetapkan otonomi khusus hingga dengan terbentuknya gerakan separatis. Sedangkan dalam konteks keimanan atau keyakinan politik identitas terefleksikan dari bermacam upaya supaya memasukan nilai – nilai keagamaan terhadap proses

---

<sup>8</sup> Sukamto.2010. "Politik Identitas (Suatu Kajian Awal Dalam Kerangka Dan Interaksi 'Lokalitas' Dan 'Globalisasi')," *Jurnal Sejarah Dan Budaya* Vol 2 no. 2

pembentukan kebijakan, termasuk gencarnya perda syariah, maupun usaha membentuk sebuah kota identik dengan agama tertentu.<sup>9</sup>

Melihat sejarah pemilu di Indonesia, politik identitas yang dilakukan cenderung terkait dengan Suku, Agama dan ideologi politik. Politik identitas yang berlebihan berakhir dengan konflik SARA dan berpotensi mengancam sistem demokrasi dan menjadi salah satu celah untuk memecah belah kesatuan dan persatuan Bangsa Indonesia.

Momentum pemilihan umum eksekutif yang diselenggarakan pada 14 february lalu, telah menunjukkan fakta politik identitas yang dilakukan oleh ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden yaitu, Prabowo – Gibran, Anies – Cak Imin dan Ganjar – Mahfud. Kampanye ketiga pasangan calon membawa identitas besar di belakangnya. Isu dan kritik terkait keislaman, hak asasi manusia (HAM) dan warna ideologi secara bersamaan mengiringi ruang gerak Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Ketiganya menjurus pada politik identitas keislaman, pemahaman terhadap HAM serta latar belakang ideologi yang selalu membangkitkan rasa penasaran publik.<sup>10</sup>

Politik identitas tidak hanya terjadi pada pemilihan presiden dan wakil presiden yang telah dipilih pada 14 Februari 2024 lalu. Pada Pilkada Jakarta tahun 2017 yang dimenangkan oleh Anies Baswedan – Sandiaga Uno pengaruh politik identitas primordialisme terkait etnis tionghoa dan agama. Setiap pasangan calon memerankan identitas masing – masing. Pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) – Djarot Saiful Hidayat memainkan identitas Tionghoa dan sekaligus menjadi representasi dari ekonomi, ras dan agama, sedangkan pasangan Anies-Sandi memerankan identitas ekonomi, ras dan Islam.<sup>11</sup>

Selain di Jakarta, pada Pilkada 2018 di Sumatera Utara, setiap pasangan calon juga melakukan praktik – praktik politik identitas. Praktik politik identitas dilakukan oleh tim Eramas dalam bentuk pendekatan kepada tokoh agama dan adat, sedangkan tim Djoss hanya melakukan praktik politik identitas berupa pendekatan tokoh adat di sejumlah daerah. Cara kerja politik identitas pada tim Eramas berupa aktivitas yang mayoritas

---

<sup>9</sup> Juhana Nasrudin.2019., “Politik Identitas Dan Representasi Politik (Studi Kasus Pada Pilkada DKI Periode 2018-2022),” Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama Vol 1, no. 1 : 34–47.

<sup>10</sup> Sugiarto dkk.2023. Politik Identitas Terhadap Polarisasi Pemilu 2024. OJS UHO

<sup>11</sup> Juhana Nasrudin. (2019). Politik Identitas Dan Representasi Politik (Studi Kasus pada Pilkada DKI Periode 2018-2022). Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama, 1(1)

bernuansa Islam, meliputi Dzikir Akbar, safari dakwah bersama Ustadz Abdussomad, Gerakan subuh berjamaah, fasilitas mobil pembersih masjid, perwiritan, dan berpartisipasi pada kegiatan adat. Sedangkan praktik politik identitas Tim pemenangan Djoss berupa aktivitas yang mayoritas bernuansa adat di sejumlah daerah dan berpartisipasi pada kegiatan adat, serta pola keagamaan dilakukan dengan cara berkunjung ke tokoh agama saja.<sup>12</sup>

## 2. Praktik Politik Identitas Pada Pilkada Aceh

Politik identitas bisa diartikan sebagai bentuk politik yang fokus utama dari kajian dan permasalahannya menyangkut berbagai perbedaan berdasarkan atas asumsi – asumsi fisik tubuh, etnisitas, primordialisme, serta pertentangan agama, kepercayaan, ras, atau bahasa, yang mana hal ini akan mengancam persatuan maupun kesatuan bangsa. Politik identitas ini didasarkan kepada esensialisme strategis, yang mana individu bertindak seolah-olah identitas merupakan entitas yang stabil demi tujuan politis. Tiap gagasan mengenai diri, identitas, komunitas identifikasi (etnisitas, bangsa, atau kelas). Politik yang mengalir hanyalah sebuah fiksi yang menandai pembakuan makna secara temporer, parsial, dan arbitrer. Politik tanpa adanya penyisipan kuasa secara arbitrer ke dalam bahasa, persilangan arah, pengeratan ideologi, pemosisian, maupun retakan ialah suatu kemustahilan.<sup>13</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Pilkada yang akan diselenggarakan 27 November 2024 mendatang juga diwarnai oleh politik identitas. Pemilukada 2024 ini, memiliki dua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yaitu, Bustami – Fadil, Mualem – Dek Fadh. Bustami Hamzah – Fadil Rahmi di usung oleh partai oleh partai Nasdem, Golkar, PAN, Partai Adil Sejahtera dan Partai Darul Aceh. Sementara Muzakir Manaf – Fadhlullah di usung oleh partai PDIP, Demokrat, PKS, PKB, Partai Aceh, PNA, PPP dan Gerindra.

Berdasarkan hasil pengamatan, observasi dan wawancara dengan masyarakat dan anggota partai politik yang terlibat kedua pasangan calon menggunakan politik identitas

---

<sup>12</sup> Dauly, S. M., Kusmanto, H., & Kadir, A. (2019). Politik Identitas Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2018. *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal*, 9(1), 51.

<sup>13</sup> Anggita Cahya Rosdiana, Annis Azhar Suryaningtyas. (2024). Politik Identitas dalam Kampanye Politik Ganjar Pranowo Menjelang Pilpres 2024: *Jurnal Audiens* 5 (1) <https://doi.org/10.18196/jas.v5i1.336>

untuk menarik simpati masyarakat Aceh dan membuat masyarakat percaya bahwa calon pemimpin Aceh adalah tokoh yang dapat dipercaya dan akan membangun Aceh menjadi lebih baik.

Politik identitas yang melekat pada pasangan Mualem – Dek Fadh berkaitan dengan sejarah konflik Aceh. Mualem diperkenalkan sebagai tokoh yang memperjuangkan Aceh dan terus konsisten ada untuk membawa Aceh kearah yang lebih baik, dibuktikan dengan adanya partai politik lokal untuk menjadi wadah aspirasi masyarakat, yaitu Partai Aceh. Sementara Bustami – Fadil membawa latar belakang politik identitas yang diperkenalkan sebagai pasangan yang diwakilkan oleh Ulama – Ulama besar baik yang ada di Aceh maupun di luar provinsi Aceh.

### 3. Peran Media Dalam Menciptakan Polarisasi Politik Identitas di Aceh

Kampanye politik yang berlangsung pada media massa, media sosial, dan jejaring sosial menjadi fenomena global. Aktor politik mengekspresikan diri secara kreatif melalui berbagai media dilakukan organisasi politik tujuannya untuk membangun citra yang baik dalam pandangan masyarakat agar memperoleh dukungan suara yang banyak pada pemilihan umum. Ada beberapa media yang sering digunakan sebagai alat komunikasi politik. Diantaranya media massa *online* dalam bentuk web, Instagram, Facebook dan Tiktok. Mereka memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mempermudah masyarakat di Aceh menyadari tokoh yang sedang di citrakan baik tersebut.<sup>14</sup> Pada media – media tersebut memiliki fitur – fitur yang ditawarkan yaitu budaya visual yang canggih sehingga dapat menyampaikan makna yang berbeda melalui video dan foto serta dilengkapi teks – teks yang menarik dan bahasa yang mudah dipahami sesuai dengan kontennya. Media online juga menampilkan visual yang lebih efektif agar dapat mengendalikan agenda politik, menampilkan respon berlebihan, dan menyampaikan konten politik secara ringkas. Selain itu, pemilik suara terbanyak saat ini berada di generasi Z, maka penggunaan media untuk kampanye politik identitas adalah sebuah keharusan. Mereka memahami dengan benar bahwa saat ini, aktivitas penerimaan informasi, transaksi data, dan barang sudah

---

<sup>14</sup> Ombi Romli, Elly Nurlia. 2023. Menimbang Isu Politik Identitas Pada Pilkada Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Tahun 2024: Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 9. No 2

dilakukan secara *online*. Dan pengguna terbanyak adalah generasi millennial dan generasi Z.



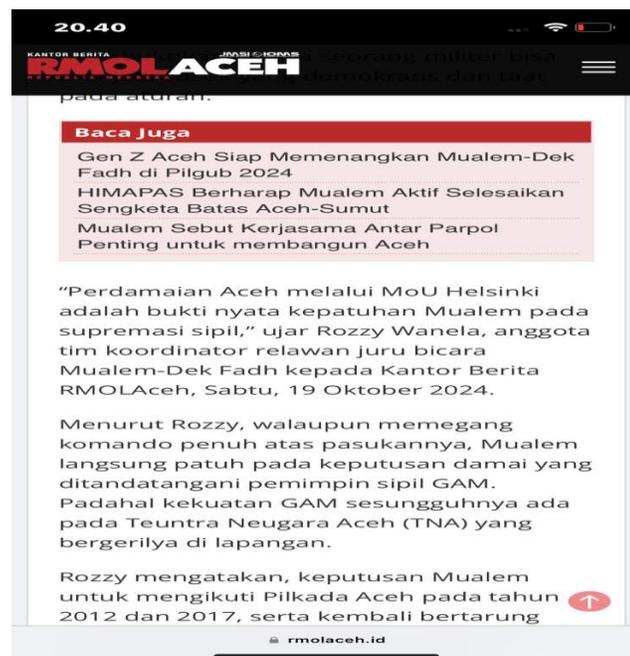
Gambar .1. Postingan Instagram Tim Pemenangan



Gambar .2. Feeds Instagram Mualem



Gambar 3. Tampilan Website Media Massa



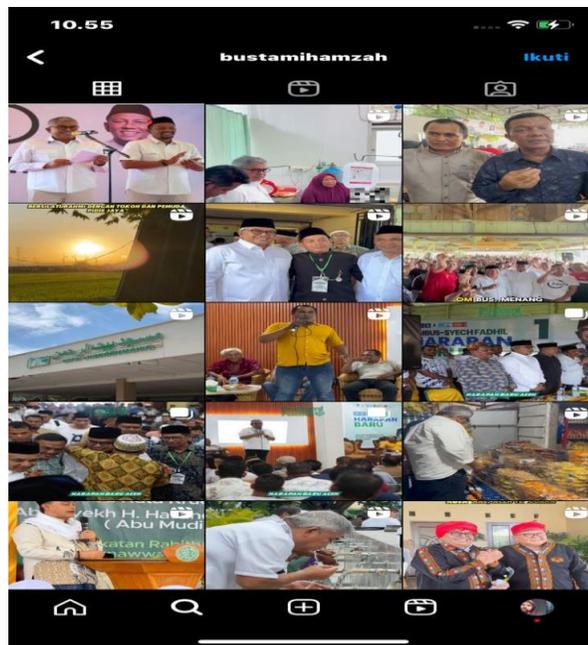
Gambar 4. Tampilan Berita di Webiste Media Massa

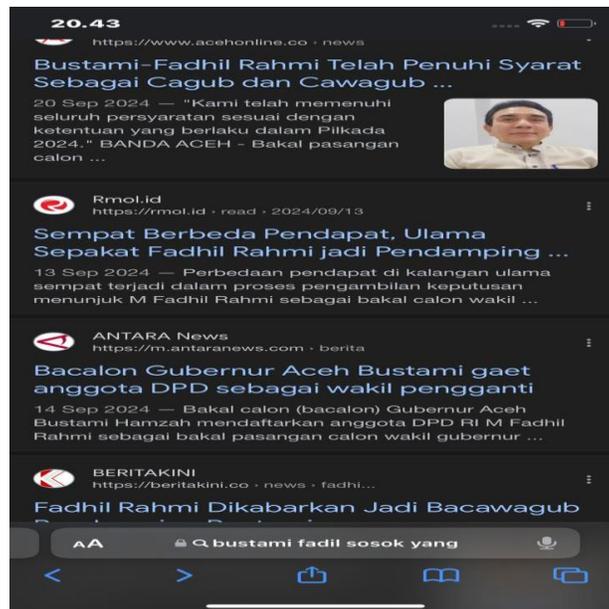
Mencermati gambar diatas yang bersumber dari media sosial Instagram tim pemenangan dan akun pribadi calon gubernur serta website yang memuat berita pasangan nomor urut 02 itu, maka dapat dilihat bahwa pasangan calon gubernur Mualem – Dek Fadh memanfaatkan media untuk meraih dukungan suara sebanyak – banyaknya. Dari isi

berita dan pengamatan penulis pada akun media sosial tersebut, pasangan Mualem – Dek Fadh menampilkan pribadi yang ramah, berwibawa dan dekat dengan ulama. Bahkan media online Serambi juga ikut memberitakan informasi – informasi terkait tim pemenangan, dukungan, visi misi tentang Mualem – Dek Fadh. Media disini, juga ikut mengambil peran dalam keberpihakan kepada salah satu pasangan calon. Informasi – informasi yang disampaikan secara persuasif telah mampu menyentuh alam bawah sadar masyarakat untuk memilih salah satu pasangan calon.



Gambar 4. Tampilan Feeds Instagram Bustami Hamzah





Gambar .5. Tampilan beberapa media massa online

Gambar selanjutnya adalah postingan pada media sosial feeds Instagram dan media massa tentang pasangan nomor 01 yaitu Bustami – Fadil. Pasangan nomor urut 01 juga ikut serta dalam politik identitas etnis, ideologi dan keagamaan. Beberapa media juga berpihak kepada pasangan calon nomor urut 02.

Beberapa gambar diatas memuat informasi yang menunjukkan bahwa media memiliki pengaruh yang sangat signifikan saat ini. Kedua pasangan calon mampu memanfaatkan media untuk mengajak, mempengaruhi dan memberikan informasi tentang identitas – identitas politik yang sedang dicitrakan.

Berdasarkan beberapa contoh gambar di atas, sebagai sampel dari masih adanya eksploitasi politik identitas di media sosial, yang mana kontestan Pemilu tidak memberi perhatian pada konteks dari visi atau program yang ingin ditawarkan kepada masyarakat, namun menampilkan identitas personal. Hal ini apabila dibiarkan tak akan memberikan edukasi politik yang cerdas bagi publik, namun cenderung akan jadi disintegrasi sosial. Disintegrasi sosial terjadi sebab ada ketidakseimbangan dalam sistem atau pun masyarakat. Untuk itu berbagai gejala disintegrasi sosial yang mungkin terjadi di dalam suatu masyarakat harus dapat diantisipasi sedini mungkin, dengan cara – cara sebagai berikut:

1. Memperkuat kesepakatan di lingkungan masyarakat tentang tujuan sosial yang ingin dicapai serta menjadi pegangan masyarakat tersebut.
2. Memperkuat norma sosial yang ada untuk menjaga tujuan yang disepakati.
3. Meningkatkan penghayatan pada norma – norma yang telah ada di dalam masyarakat.
4. Sanksi kian diperkuat serta dilaksanakan secara konsekuen maupun konsisten.
5. Tindakan yang dilaksanakan setiap warga masyarakat harus seirama dengan berbagai norma yang berlaku di masyarakat.<sup>15</sup>.

## KESIMPULAN

Politik identitas sebenarnya baik dan dapat dimainkan demi terciptanya ekualitas bagi semua warga negara agar tiap individu memiliki kesempatan yang sama di semua bidang, baik pendidikan, ekonomi, politik, dan pemerintahan. Sebab pada realitasnya, masih terjadi dikotomi antara mayoritas dan minoritas, maka kerap terjadi diskriminasi, yang mana identitas inheren menjadi faktor utama guna mengurangi peluang. Padahal, konstitusi mengamanatkan inklusivitas.

Politik identitas, termasuk yang lewat media sosial, kerap diartikan sebagai politik yang mengedepankan relasi emosional dan merendahkan pertimbangan rasional. Ihwal ini kian masif sejak maraknya penggunaan media sosial ditambah dengan perilaku dari generasi milenial yang cenderung kurang agresif dalam hal politik, sehingga pilihan yang ditentukan dalam pelaksanaan Pemilu lebih karena bersifat dorongan serta kurang mengedepankan pilihan karena berdasarkan pertimbangan kemanfaatan umum. Pilihan dilaksanakan berdasarkan identitas, karena relasi ras, etnis, primordial, dan juga karena kesamaan keyakinan agama.

Upaya penanganan eksploitasi politik identitas, termasuk melalui media sosial, perlu dilaksanakan secara masif, sistematis, dan komprehensif, dengan melibatkan semua pelaksana Pemilu, aparat penegak hukum, serta institusi/Lembaga terkait lain.

---

<sup>15</sup> Arus Reka.2019. Pengaruh Politik Identitas Melalui Media Sosial Terhadap Generasi Milenial Dan Pelaksanaan Pemilu : Prosiding Comnews 2019

## DAFTAR PUSTAKA

- Agung Suryo.2019. *Pilkada Aceh Tengah 2017: Antara Kontestasi Dan Aliansi Antar Belah*: Seminar Series in Humanities and Social Sciences
- Andre Pebrian Perdana. 2023. *Dampak Politik Identitas Pada Pemilihan Umum 2024 Mendatang*: [Jurnal.balitbangda.lampungprov.go.id/](http://Jurnal.balitbangda.lampungprov.go.id/)
- Anggita Cahya Rosdiana, Annis Azhar Suryaningtyas. (2024). *Politik Identitas dalam Kampanye Politik Ganjar Pranowo Menjelang Pilpres 2024*: Jurnal Audiens 5 (1) <https://doi.org/10.18196/jas.v5i1.336>
- Arus Reka.2019. *Pengaruh Politik Identitas Melalui Media Sosial Terhadap Generasi Milenial Dan Pelaksanaan Pemilu* : Prosiding Comnews 2019
- Aryojati Ardipandanto.2023. *Upaya Mencegah Penyalahgunaan Politik Identitas Pada Pemilu 2024*: PUSLIT BKD, Vol. XV, No. 6/II/Puslit/Maret/2023 [https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-XV-6-II-P3DI-Maret-2023-203.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XV-6-II-P3DI-Maret-2023-203.pdf) Diakses pada 15 Oktober 2024
- Dauly, S. M., Kusmanto, H., & Kadir, A. (2019). *Politik Identitas Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2018*. Jurnal Administrasi Publik : Public AdministrationJournal, Vol 9 No 1
- Ian Perdana. 2023. *Strategi Propaganda Dalam Pilkada Gubernur Aceh Tahun 2017*: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023
- Juhana Nasrudin. 2019. *Politik Identitas Dan Representasi Politik (Studi Kasus Pada Pilkada DKI Periode 2018-2022)*, Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama Vol 1, no. 1 : 34–47.
- Mahpudin, M. (2021). *Kebangkitan Politik Identitasndalam Proses Demokratisasi di Indonesia Pasca Orde Baru*. Jurnal Sosial Politik, 7(2), 148–160. <https://doi.org/10.22219/sospol.v7i2.10781>
- Nur Lailatul Aidah, Sindy Rochmadian, Usna Maliha. 2023. *Politik Identitas Dalam Pemilu DanPengaruhnya Terhadap Demokrasi Di Indonesia*. Sosio Yustisia : Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial 3 (1)
- Ombi Romli, Elly Nurlia. 2023. *Menimbang Isu Politik Identitas Pada Pilkada Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Tahun 2024*: Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 9. No 2

Restu Hasanuddin. 2024. *Pendekatan Kolaboratif Terkait Pencegahan Politik Identitas Pada Pemilihan Kepala Daerah* : Jurnal Lemhannas RI

Sugianto dkk.2023. *Politik Identitas Terhadap Polarisasi Pemilu 2024*. OJS UHO

Sukanto.2010. “*Politik Identitas (Suatu Kajian Awal Dalam Kerangka Dan Interaksi ‘Lokalitas’ Dan ‘Globalisasi’)*,” Jurnal Sejarah Dan Budaya Vol 2 no. 2